



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN,SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23** Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

ABDUL RAHMAN,SH
NIP. 19770722 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	5
1	- Meningkatkan Kepatuhan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha		- Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	- 100%	Renstra/Casca ding
	Keg.	terfasilitasinya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Terlayannya Permohonan Penerbitan SIUP-MB DAN Rekomendasi SIUP-MB dan Bahan Berbahaya bagi Distributor melalui Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 1 Dokumen	Renstra/Casca ding
		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Renstra/Casca ding
		Tersusnya Laporan Pelaku Usaha Minuman Beralkohol (MB) dan Bahan Berbahaya (B2) yang terlayani Siupnya dan terdaftar di OSS	- Jumlah Pelaku Usaha MB dan B2 yang terlayani SIUPnya dan terdaftar di OSS	- 1 Dokumen	Renstra/Casca ding
2	- Meningkatkan Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi		- Persentase Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	- 10%	Renstra/Casca ding
	Keg.	Terfasilitasinya sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- Persentase Sarana Prasaran Perdagangan sesuai standar	- 10%	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusnya laporan Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Laporan	Renstra/Casca ding
		Tersusunnya laporan Pasar, Retail dan sarana distribusi perdagangan lainnya di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan Pasar, Retail dan sarana distribusi perdagangan lainnya di 13 Kab/Kota	- 1 Laporan	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusunnya laporan Inventarisasi Komoditi/Produk Unggulan Daerah yang berpotensi keikutsertaan Pasar Lelang Komoditas	- Inventarisasi Komoditi/Produk Unggulan Daerah yang berpotensi keikutsertaan Pasar Lelang Komoditas	- 1 Laporan	Renstra/Casca ding
		Tersusunnya Laporan Invertarisir Data dari SIGM	Jumlah Laporan Inventarisir Data dari SIGM	1 Laporan	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Dalam Rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	- Jumlah Kegiatan Fasilitasi Dalam Rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	- 1 Kegiatan	Renstra/Casca ding
3	- Meningkatkan Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.80%	Renstra/Casca ding
	Keg.	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100%	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4laporan	Renstra/Casca ding
		Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4laporan	Renstra/Casca ding
	Keg.	Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	- Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	- 100%	Renstra/Casca ding

		Tersusunnya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	- 4 Laporan	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 4 Laporan	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Terperuhnya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka stabilisasi harga	Jumlah pelaksanaan operasi pasar bersubsidi dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	6 Kegiatan	Renstra/Casca ding
	Keg.	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	90	Renstra/Casca ding
		Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	1 Laporan	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	- 1 Dokumen	Renstra/Casca ding
4	-	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	- 10%	Renstra/Casca ding
	Keg.	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	- Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	- 10%	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan	Renstra/Casca ding
	Keg.	Terlaksananya peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	- 10%	Renstra/Casca ding
		Terlaksananya UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	- Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	- 30 UMKM	Renstra/Casca ding
	Sub.keg	Tersusunnya laporan Inventarisir Data UMKM yang terkurasi 13 Kab/kota	- Jumlah Inventarisir Data UMKM yang terkurasi 13 Kab/kota	- 1 Laporan	Renstra/Casca ding
		Jumlah Inventarisir Data UMKM yang terkurasi 13 Kab/kota	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Renstra/Casca ding

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 28,030,150	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 28,030,150	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 28,030,150	
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 509,839,750	APBD
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	= Rp. 509,839,750	
Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp. 9,840,000	
Sub.keg Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 499,999,750	

3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp.	37,129,550	APBD
	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp.	37,129,550	
	Sub.keg Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp.	37,129,550	



PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RICHARD ARNAL DO, SE,MSA

NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, **23** Februari 2026

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI



ABDUL RAHMAN,SH

NIP. 19770722 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI MUSDALIFAH, S.Pd, SH, Msi**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123N200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ANDI MUSDALIFAH, S.Pd., SH, M.Si
NIP. 19730125 199703 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri		Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi	100%	Renstra/Cascading
	Keg	Penyusunan , Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	93,27 %	Renstra/Cascading
	Sub.keg	Terselenggaranya Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Laporan 50 orang	Renstra/Cascading
		Tersusunya Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri Provinsi (RPIP)	1 Dokumen	Renstra/Cascading
		Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Renstra/Cascading
2	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100%	Renstra/Cascading
	Keg	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	100%	Renstra/Cascading
	Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Renstra/Cascading
	Sub.keg	Terlaksananya Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (Siinas) yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui Siinas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA,	1 Dokumen	Renstra/Cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 43,995,550	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 43,995,550	
Sub.keg Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 6,050,000	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 12,949,750	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 24,995,800	
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 30,999,650	APBD

Keg	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp.	30,999,650
Sub.keg	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp.	14,174,950
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp.	16,824,700


PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE.MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

Pahu, **23** Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI

ANDI MUSDALIFAH, S.Pd, SH.Msi
 19730125 199703 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 92 indeks	Renstra/Cascading
	- Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	- Cakupan Bina Pelaku IKM (%)	- 15,75	Renstra/Cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 137,500,000	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 513,750,000	APBD

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE, MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN
KERAJINAN DAERAH

HAPIT TOLLASE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARGIE LESTARI,SH**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23** Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


MARGIE LESTARI,SH
NIP. 19740324 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	-	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan luar negeri yang Difasilitasi	100%	Renstra/Cascading
	Keg	Terfasilitasinya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan klinik Ekspor	Persentase penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Klinik Ekspor	100%	Cascading
	Sub.Keg	Terlaksananya Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan	12 Laporan	Cascading
		Terlaksananya layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Pelaku usaha	Jumlah Laporan layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Pelaku usaha	12 laporan	Cascading
		Terlaksananya Kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Peragangan Luar Negeri	1 Laporan	Cascading
2	-	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Barang	25818. jutaUSD	Renstra/Cascading
	Keg	Terlaksananya Promosi Dagang Produk Unggulan Sulawesi Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan promosi produk Unggulan Sulawesi Tengah	1 Laporan	Cascading
	Sub.Keg	Tersusunya Roadmap Pengembangan Ekspor Daerah	Buku Roadmap Pengembangan Ekspor	1 Buku	Cascading
		Tersusunya Pedoman Branding Daerah	Buku Pedoman Branding	1 Buku	Cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 74,999,700	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	= Rp. 74,999,700	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 74,999,700	

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE,MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, 23 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

MARGHI AESTARI, SH
Nip. 19740324 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO ,SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23** Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	
1	-	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	-	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	-	93,27% Renstra/Cascading
	Keg	Meningkatnya Persentase pertumbuhan industri	-	Persentase Pertumbuhan jumlah Industri	-	5,20% Renstra/Cascading
	Sub.keg	Tersusnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	1 Dokumen Renstra/Cascading
		Tersusnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	1 Dokumen Renstra/Cascading
		Tersusnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	1 Dokumen Renstra/Cascading
2	-	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	-	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	-	90% Renstra/Cascading
	Keg	Terawainya Industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	-	Persentase industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	-	68,69% Renstra/Cascading
	Sub.keg	Tersusnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	1 Dokumen Renstra/Cascading
		Tersusnya Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	1 Dokumen Renstra/Cascading
		Tersusnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	1 Dokumen Renstra/Cascading

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	=	Rp.	60,800,281	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	=	Rp.	60,800,281	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	=	Rp.	10,800,000	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	=	Rp.	25,000,281	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	=	Rp.	25,000,000	

2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	=	14,199,750	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	14,199,750	
	Sub.keg Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	1,997,400	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp.	4,350,000	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke	= Rp.	7,852,350	

Paku, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RICHARD ARNALDO, SE,MSA
NIP.19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN
PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN
INDUSTRI



MIRA YULIANTUTI, ST,MP
Nip.19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23** Februari 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 85	Renstra/Cascading
	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang terakreditasi dan Non akreditasi	- 87%	Renstra/Cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pengujiang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 253,502,460	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 43,747,156	APBD

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE,MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOLVANITA PADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19780801 200701 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PATRICIA ZULKIFLI YABL.S.STP,M.Si**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung Pihak **Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, ~~23~~Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

PATRICIA ZULKIFLI YABL.S.STP,M.Si
NIP. 19860521 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 78,94	Renstra/Cascading
	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100	Renstra/Cascading

Program	Keterangan		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp76,439,522	APBD
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp49,999,500	APBD

Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN



PATRICIA ZULKIFLI YABI, S.STP.M.Si
Nip. 19860521 200412 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSKISAN S.Sos,M.SI**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Februari 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

YUSKISAN S.Sos,M.SI
NIP. 19750803 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	B Indeks Kepuasan Masyarakat	Renstra/Cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 17,386,572,832	APBD

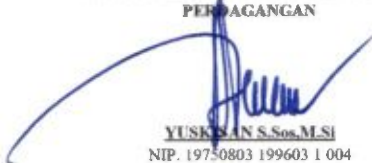
Palu, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


RICHARD ARNALDO, SEMSA
NIP. 19821223 200604 1 006



PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


YUSKI S. S. Sos, M.Si
NIP. 19750803 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHDAYANI, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YUSKISAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

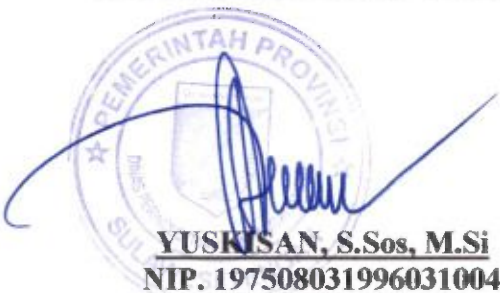
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YUSKISAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197508031996031004


WAHDAYANI, S.STP., M.Si
NIP. 198201102000122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
	KEG : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks 80,70	RHK
	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks 60,01	RHK
	Meningkatnya Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Indeks 71,20	RHK
	Sub KEG : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Jumlah dokumen kompilesi data administrasi kepegawaian (mjd, abk, stj, profil pegawai sesuai dari kualifikasi, kompetensi dan kinerja individu)	1 Dokumen	RHK
	Sub KEG : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	RHK
	Sub KEG : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	RHK
	Sub KEG : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	RHK
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	RHK
	Tertaksananya Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	RHK
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	1 Dokumen	RHK
	Meningkatnya Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SIP4N Lapor	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SIP4N Lapor	1 Dokumen	RHK
	Sub KEG : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	RHK
	Sub KEG : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	RHK
	Sub KEG : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	RHK

Sub Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	RHK
Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	RHK
Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3 Dokumen	RHK
Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen	RHK
Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	RHK
Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	RHK

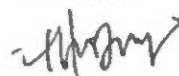
Program	Anggaran	Jeterangan
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	=	APBD
Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	=	
Sub Keg Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp8.950.000
Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	=	
Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp4.026.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp42.824.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp7.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp59.021.000
Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	=	
Sub Keg Penyediaan Jasa surat menyurat		
Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp260.006.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp231.368.694
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp109.940.000

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


YULI WASISA S. SIREGAR
NIP. 19750803 199603 1 004

23 FEB 2018

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM


WAHDAYANI S. SIREGAR
NIP. 19820110 200012 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSKISAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


YUSKISAN, S.Sos., M.Si
NIP. 197508031996031004


ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	KEG : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,05 indeks	renstra/ cascading
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	90%	renstra/ cascading
		Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	2	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	renstra/ cascading
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dok	renstra/ cascading
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dok	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 dok	renstra/ cascading
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	renstra/ cascading
	Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral			
	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	renstra/ cascading

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		APBD
Keg : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 23,058,050	
Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 23,058,050	
Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 0	
Sub Keg : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp. 0	
Sub Keg : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Rp. 0	
	Palu,	

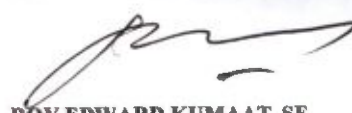
23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



YUSKISAN S.Sos,M.Si
NIP. 19750803 199603 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PROGRAM



ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 198203212009041004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSLENI ALUMAN, S.Kom., MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSKISAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUSKISAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19750803 199603 1 004

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ROSLENI ALUMAN, S.Kom., MM
NIP. 19740629 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
-1	-2	-3	-4	
	KEG : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase realisasi anggaran	90%	renstra/ casing
		Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100%	renstra/ casing
	Sub Keg : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	202 Org/bulan	renstra/ casing
	Sub Keg : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	renstra/ casing
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PPPK Paruh Waktu yang dibayarkan BPJS Kesehatan	45 Orang	renstra/ casing
	Sub Keg : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	renstra/ casing
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	renstra/ casing
	Sub Keg : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	renstra/ casing
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD			
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	renstra/ casing
	Sub Keg : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	renstra/ casing

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
-1	-2	-3	-4	
	Keg : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)			
	Subkeg : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	renstra/ casing
	Subkeg : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1 Dokumen	renstra/ casing
	Sub Keg : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	renstra/ casing
	Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	2 laporan	renstra/ casing
	Sub Keg : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 laporan	renstra/ casing
	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	renstra/ casing
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 unit	renstra/ casing
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 unit	renstra/ casing
	Sub Keg : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	renstra/ casing

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
-1	-2	-3	-4	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		APBD
Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.573.234.488	
Sub Keg : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16,334.044.487,74	
Sub Keg : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 191.390.000	
Sub Keg : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 27.000.000	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 20.800.000	
Sub Keg : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 0	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp. 0	
Sub Keg : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 0	
Keg : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15.600.000	
Sub Keg : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 15.600.000	
Sub Keg : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 0	
Sub Keg : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 0	
Sub Keg : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 0	
Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 0	
Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 160.964.700	
Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 114.957.700	
Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 15.257.000	
Sub Keg : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 30.750.000	

Palu, 23 FEB 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


YUSKISAN S. Sos. M. Si
NIP. 19750803 199603 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET


ROSLANI ALUMAN, S. Kom., MM
NIP. 197406291999032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIASARI FATTAH, SP**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 Feb 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIDJI S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA
UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIASARI FATTAH, SP
NIP. 1970212000122007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
1.	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tim Auditor (Dokumen)	1 dok	Renstra / cascading
2.	Sub Keg : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Tersedianya Dukungan Teknis Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disusun	1 dok	Renstra / cascading
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 dok	Renstra / cascading
3	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Ketatausahaan yang Tepat Waktu	0	Renstra / cascading
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	Renstra / cascading
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	Renstra / cascading
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	Renstra / cascading
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	Renstra / cascading
4.	Sub Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang Disediakan	0	Renstra / cascading
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	Renstra / cascading
5.	Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Renstra / cascading
6.	Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (Fotocopy)	0	Renstra / cascading
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	Renstra / cascading
7.	Sub Keg : Fasilitas Kunjungan Tamu			
	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Secara Terencana dan Profesional	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	0	Renstra / cascading
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	Renstra / cascading
8.	Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Renstra / cascading
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	Renstra / cascading

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
9.	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusang Pemerintah			
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
10.	Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Renstra / cascading
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Renstra / cascading
11.	Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	4 laporan	Renstra / cascading
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	Renstra / cascading
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	Renstra / cascading
12.	Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Renstra / cascading
	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran, Koordinasi dan Komunikasi Kedinasan	Jumlah Surat Keluar yang Dikirim dan Surat Masuk yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	0	Renstra / cascading
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan	Renstra / cascading
13.	Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Renstra / cascading
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tepat Waktu	4 laporan	Renstra / cascading
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	Renstra / cascading
	Sub Keg :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Tersedianya Sarana Pelayanan Umum Kantor secara Tepat Waktu dan Berkualitas	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor (kebersihan dan lain-lain)	0	Renstra / cascading
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	Renstra / cascading

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
14.	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6 unit	Renstra / cascading
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65 unit	Renstra / cascading
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	Renstra / cascading
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	Renstra / cascading
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya selama 12 bulan	6 unit	Renstra / cascading
15	Sub Keg : Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin, Pembayaran Pajak dan Pengurusan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional agar Beroperasi Optimal	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Dipelihara	0	Renstra / cascading
16.	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65 unit	Renstra / cascading
	Terpeliharanya Aset Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Dipelihara/Diperbaiki	0	Renstra / cascading

Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Keg : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0
Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp45,102,460
Sub Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0
Sub Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp10,864,460
Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0
Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp34,238,000
Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp208,400,000
Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0
Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp204,000,000
Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0
Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4,400,000
Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0
Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp0
Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
----	-------------------------------	-------------------	--------	-----

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI

RIASARI FATTAH, SP
NIP. 19700212000122007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23 FEB 2026**

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
-1	-2	-3	-4	
	KEG: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
	Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia	Persentase pengujian komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	100%	arsitektur kinerja
1	Sub Kegiatan : Pemantauan Mutu Produk			
	Terpantaunya Mutu Produk Unggulan	Jumlah Produk Unggulan yang Terpantau	0	arsitektur kinerja
	Meningkatnya kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	0	renstra
2	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian			
	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah laporan/sertifikat pengujian mutu barang yang diterbitkan (laporan)	150 sertifikat	renstra
	Terbimbingnya tenaga teknis terkait Bimtek	Jumlah tenaga teknis yang terbimbing	0	arsitektur kinerja
	Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia	Jumlah Kelengkapan Bahan Kimia	1 Paket	arsitektur kinerja
	Terjaminnya Kualitas Pengujian melalui surveillance	Sertifikat Akreditas Laboratorium	1sertifikat	arsitektur kinerja
	Terukurnya Kinerja Laboratorium melalui Uji Profisiensi	Laporan Hasil Uji Profisiensi	0	arsitektur kinerja
3	Sub Keg: Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi			
	Terjaminnya Kualitas Layanan Lembaga Sertifikasi Produk	Sertifikat Akreditas Laboratorium	1sertifikat	arsitektur kinerja

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsu		Anggaran	Keterangan
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Keg	Pemantauan Mutu Produk	= Rp.	0
Sub Keg	Pengembangan Layanan Pengujian	= Rp.	21.747.156
Sub Keg	Pengembangan Layanan Sertifikasi	= Rp.	1.500.000

Palu, 23 Feb 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU
BARANG

NOLVANITA MADJIJI, S.Ag., MM
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 197506072001122004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Keg : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk siseluru Kabupaten/Kota			
	Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	Persentase kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	100%	renstra/cas cading
	Sub Keg : Pengembangan Layanan Kalibrasi			renstra/cas cading
	Terlayannya Permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha	jumlah sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	300sertifikat	renstra/cas cading
	Terjaminnya kualitas Kalibrasi melalui re-akreditasi	hasil penilaian re-akreditasi	100%	renstra/cas cading
	Terukumnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi	nilai uji hasil profisiensi	0	renstra/cas cading
	Rekalibrasi alat standar	jumlah alat yang direkalibrasi	0	renstra/cas cading
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	3dok	renstra/cas cading
	Terbimbingnya tenaga teknis kalibrasi peralatan ukur	Jumlah petugas kalibrasi yang mengikuti diklat	0	renstra/cas cading

Program

Anggaran

Keterangan

1. Keg : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk siseluru Kabupaten/Kota

APBD

Sub Keg : Pengembangan Layanan Kalibrasi

Rp. 20,500,000

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NOLYANITA LADJIDJI S. Ag. M.M
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI KALIBRASI

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 198510312011012006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
NIP. 19780622 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dok	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	1 Dok	renstra/ cascading
	Sub Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	renstra/ cascading
	Sub Keg : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0	renstra/ cascading
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 paket	renstra/ cascading
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	0	renstra/ cascading
		Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	renstra/ cascading
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	renstra/ cascading
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 paket	renstra
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan		
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	0	renstra/ cascading
	Sub keg : Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 paket	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	renstra/ cascading
	Sub Keg : Fasilitas Kunjungan Tamu			
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		1 laporan	renstra/ cascading
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	renstra/ cascading
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	renstra/ cascading
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	renstra/ cascading
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0 laporan	renstra/ cascading

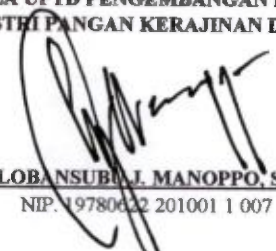
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	renstra
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	renstra
	Sub Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	renstra
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	renstra
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	renstra
		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	renstra
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	renstra
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	renstra
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 unit	renstra
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	renstra
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0 unit	renstra

		Anggaran	Keterangan
		137,500,000	
1	KEG : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	APBD
	SUB KEG : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	
2	KEG : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 13,000,000	
	Sub Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	
	Sub keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10,000,000	
	Sub Keg : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	
	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	
	Sub Keg : Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 3,000,000	
	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 124,500,000	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120,000,000	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	
	Sub Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Rp.	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 4,500,000	
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN
DAERAH

HAPTI TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

LOBANSUBI L. MANOPPO, SE
NIP. 19780622 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

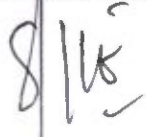
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUK PANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

Palu, 23 FEB 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARANKEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KEG. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
	Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1 Dok	Renstra/ Cascading
	Sub Keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
	Terfasilitasinya layanan konsultasi dan jasa produksi bagi pelaku usaha IKM pangan, mahasiswa, pelajar dan masyarakat	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang terfasilitasi	250 IKM dan Masyarakat	Renstra/ Cascading
	Terbinanya IKM dalam Peningkatan mutu Produk Pangan	Jumlah Pelaku Usaha IKM Pangan yang terbina	12 Pelaku IKM	Renstra/ Cascading
	Terfasilitasinya Promosi dan Pemasaran Produk IKM di Galeri Produk IKM Pangan dan Kerajinan	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk IKM yang terfasilitasi	1 dokumen	Renstra/ Cascading
	Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah Sumber layanan di Galeri Produk IKM Pangan dan Kerajinan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan di Galeri IKM Pangan dan Kerajinan	Rp. 25.000.000	Renstra/ Cascading
	Terlaksananya penyusunan dan Evaluasi Rencana Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Pangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Industri Pangan	1 dokumen	Renstra/ Cascading

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

KEG. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Anggaran

Keterangan

Rp. 23.143.250,00

APBD

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN
KERAJINAN DAERAH

HAPIT TOLLA, SE

NIP. 19771121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI INDUSTRI PANGAN

[Signature]

VERADIAN SAPHIRE, SP, MM

NIP. 19750319 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23 FEB 2026**

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KEMASAN DAN
KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN. M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARANKEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KEG. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
	Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2 Dok	Renstra/ Cascading
	Sub Keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2 Dok	Renstra/ Cascading
	Terfasilitasinya konsultasi dan jasa layanan kemasan produk dan kerajinan bagi pelaku usaha IKM dan masyarakat	Jumlah Produksi dan layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan Masyarakat yang terfasilitasi	465 IKM dan masyarakat	Renstra/ Cascading
	Terbinanya IKM dalam Peningkatan Mutu produk IKM Kemasan dan kerajinan	Jumlah Pelaku IKM kemasan dan kerajinan yang terbina	65 Pelaku IKM	Renstra/ Cascading
	Terfasilitasinya Promosi dan Pemasaran Produk IKM kerajinan	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk IKM	1 Dok	Renstra/ Cascading
	Terkelolanya Website layanan IKM kemasan	Jumlah website administrasi rumah kemasan dan layanan IKM secara Online	1 Dok	Renstra/ Cascading
	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi rencana koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan	1 Dok	Renstra/ Cascading
	Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah Sumber layanan Rumah Kemasan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan rumah kemasan	Rp. 80.000.000	Renstra/ Cascading

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

KEG. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Anggaran

Keterangan

Rp. 490.606.750,00

APBD

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN
KERAJINAN DAERAH


HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI KEMASAN DAN KERAJINAN
DAERAH


RIDWAN, M. ST., MM
NIP. 196807212001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PATRICIA Z. YABI, SSTP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **23 FEB 2026**

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PATRICIA Z. YABI, SSTP. SE., M.Si
NIP. 19860521 200412 2 001

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

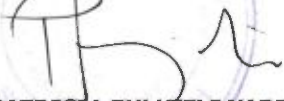
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 laporan	renstra/ cascading
	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 unit	renstra/ cascading
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 unit	renstra/ cascading
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	4 unit	renstra/ cascading
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	0	renstra/ cascading
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	renstra/ cascading
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 unit	renstra/ cascading
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 unit	renstra/ cascading

1	Keg : Administrasi Keuangan	=	
	Sub Keg : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	=	
	Sub Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	=	
	Sub Keg : Pendidikan dan Pelatihan Penawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	=	
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	=	
	Sub keg : Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		
	Sub keg : Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,999,222	
	Sub Keg : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	
	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	
	Sub Keg : Fasilitas Kunjungan Tamu	0	
	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,075,000.00	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	0	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat	0	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,008,400.00	
	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	2,356,900.00	
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	

Keterangan

APBD

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
----	--------------------------------	-------------------	--------	-----

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI

PATRICIA ZULKIFLI YABI, S.STP,M.Si
Nip. 19860521 200412 2 001

Palu 23 FEB 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PELAKSANAAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

INDRIYANI SE
Nip. 197110181992022006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALI,SE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **PATRICIA Z. YABL, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PATRICIA Z. YABL, S.STP., M.Si
NIP. 19860521 200412 2 001

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN N.ALI,SE
NIP. 19780531 200212 1 003

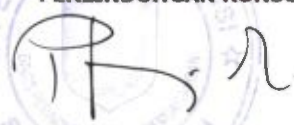
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Keg :Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh			
	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan Tertib Niaga yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (Kasus)	4 laporan	renstra/ cascading
	Sub Keg : Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			
	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	2 laporan	renstra/ cascading
	Terlaksananya Pengawasan Perdagangan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	2 Laporan	renstra/ cascading
	Sub Keg : Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga			
	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	9 Kasus	renstra/ cascading

1 : Pelaksanaan Barang beredar dan/Jasadiseluru Daerah Kabupaten/ k

Keg : Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Rp. 24,999,800

Sub Keg : Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan
Perlindungan Konsumen dan tertib niaga Rp. 0


PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

PATRICIA ZULKIFLI YABL, S.STP,M.SI
Nip. 19860521 200412 2 001

Palu. 23 FEB 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PENGAWASAN BARANG
BEREDAR DAN JASA

RIDWAN N. ALI, SE
Nip. 197805312002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **PATRICIA Z. YABI, SSTP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 23 FEB 2026

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PATRICIA Z. YABI, SSTP., SE., M.Si
NIP. 19860521 200412 2 001

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

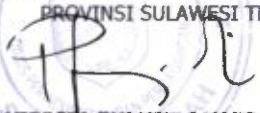
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Keg : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Seluru dikab./kota			
	Terlaksananya fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	5 Bpsk	renstra/ cascading
		Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	43 Pengaduan	renstra/ cascading
		Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	1	renstra/ cascading
2.	Sub keg : Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			
	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	5 Aduan	renstra/ cascading
	Terfasilitasinya aduan konsumen	Jumlah Aduan Konsumen yang difasilitasi	43	renstra/ cascading
	Terlaksananya Survey IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen)	Jumlah Responden yang Mengisi Kuisisioner IKK	200 orang	renstra/ cascading
3.	Sub Keg : Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen			
	Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memneriukan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya	1 lkpsm	renstra/ cascading
	Tersosialisasinya Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Brosur yang disebar terkait IKK	354 BROSUR	renstra/ cascading
	Tersosialisasinya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindunagn Konsumen	Jumlah laporan sosialisasi terkait dengan perlindungan Konsumen	1 laporan	renstra/ cascading
	Terfasilitasinya BPSK Kab/kota	Jumlah BPSK Kab/Kota	5 BPSK	renstra/ cascading
4.	Sub Keg : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			
	Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	43 Aduan	renstra/ cascading
	Terverifikasi dan Terevaluasinya Kinerja BPSK Secara berkala	Jumlah laporan Verifikasi dan Evaluasi Kinerja BPSK	2 Laporan	renstra/ cascading

1.	Keg : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Seluru dikab./kota	Keterangan
2.	Sub keg : Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp. 523.449.700
3.	Sub Keg : Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp.0
4.	Sub Keg : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp. 1.550.000

Palu, 23 FEB 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PATRICIA ZULKIFLI YABI, S.STP,M.Si
Nip. 19860521 200412 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PURWATA, SE
Nip. 197106101991031005